

BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWj NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

KELEMBACAAN SEKOLAII DASAR KABUPATEN ML'LAWI

mula I MI History

DENGAN RAHMAT TIJIIAN YANG MAHA ESA BUPATI MELAWI,

Uenimbang

- a. bahwa guna menunjang wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (SGi1jLilå1i) Taliun dalum upaya meningkatkan daya tumpung Sekoluh Dusarse i ta meningkatkan mutu dan efisiensi gekolah Dasar dipandung perlt; unluk membentuk Unit Peiaksana Teknis Daerah mengenai Kelembagaan Sekolah Dasar di Kabupalen Melawi;
- b. bahwa untuk melaksanukan maksud padu huruf a tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Meiawi.

Mengingat

- Undang-I_Jndang Nomor 20 "I'ahun 2003 tentang Sislem Pendidikali Nasional (Lembarun Negara Republik Indonesia Talmn 2003 Nomor 78, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-IJndang Nomor 34 Tahun teniung Pembentukail Kabupaten Melawi dun Sekadau di Pcopinsi Kalimuntan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1-19, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 3. Undang-l_jndang . Nomor 10 Tahun 200-1 lentang Pembenlukan Peraturan Perundung-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-IJndang Nomor 32 Tahun 2()04 tentang Pemerintali Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4437) Sebagaimana telah diubafi beberapa kali*terakhir dengan Undang-tlndang blomor 12

- unqang-UllUung X) c.uv•t 1 Keuangun Antara Pemerintah Pusul dan Pemeriiilüliun bau-uh (Lembaran Negaru Republik Indonesiu Tahun 2004 blomor 126, Tulilbahan Lgmbarun Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerinlüll Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahun Atas Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 1990 lentang Pendidikan f)asuv (Lembaran Neguca Republik Indonesia Tahun 1998 Nomen' 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia blomor 3763);
- 7. Pcraluran Pemerinluh Nomoi 19 Tuhun 2005 Slandar Nasionul Penclidikan (lucmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tlomoc 41, Tambahan Lembaran Negaau Republik Indonesia Nomor 0496);
- 8. Peraluran Pemerintah Nomoi" 58 Tahun 2005 tentang Pengelol Keuangan Daerall (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia blonaor 4578);

Vfcmperhatikan

Peraturun Bupa[i Melawi Nomor 31 Tahun 2007 teutang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tala Kaja Dinas Pendidikun Kabupaten Melawi (Becita Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 186).

MEMVT(JSKAN:

D. CEIMICAN

VIenetapkan

PERATURAN B(JPAH MELAWI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAII MENGENAI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN K, FELAW1.

- 9. Pecaturan Pemerintah Nomor 79 Tuhun 2005 lentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tuhun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahau antara Pemerintah, Pemerintahun I)aeruli Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembarau Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82* Tumbahan Lemburun Negara Republik Indonesia Nölnoc 41737);
- 11. Peraturun Pemerintali Nornor 41 Tuhun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daeruh (Lemburan Neguru Republik Indonesiu Tulillii 2007 blomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiu No.4741);
- 12. Pertiiuran Daerah Kabnpaten Melawi Nomor 21 Tuhun tentang Pembentukan Organisasi Perangkal Daerah Kubupulen tviclawi (Lembaran Daerah Kabupaten McIuwi Tahun 2007 Nomor 21. Tumbahan Lembaran Daerah Kitbuputen Melawi Nomor 4 J);
- 13. Peraturan Daerali Kabupaten Melawi Nomor 3 Tuhun 2009 tenlang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Melawi (Lenabiiran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2009 Nomor 3. Tambahan lembaran Daerah Kabuputen Melawi Nomor 78)

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

:iwalaM	Kabupaten	dalaba	Dacrah	. [

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Melawi;
- 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi;
- 6. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural setingkat Eselon IV;
- 7. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional;
- 8. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan dan konseling dalam Jabatan fungsional;
- 9. Sekolah Dasar adalah Jenjang Pendidikan Dasar;
- Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas
 Pendidikan sebagai pelaksana jalannya pendidikan Sekolah Dasar;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi;
- 12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dengan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- 13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah;
- 14. Sistem Pendidikan Masional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Masional;
- 5. Peserra Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melahui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

- 17.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosén, konselor, pamong belüjar, uidyuswura, tutor, insuukiur. fusiIiLåtor dan sebutan Iain sesuai dengan keLhususannyu serlu berpartisipa•si dalam menyelenggarakan pendidikun;
- 18. Kurikulum adalali seperangkar rencana dan pengatnrüii aucngenui tujuan. isi dun bahun pelajaran serlå cara• yang digunakan sebugai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk anencupai tujuan pendidikun tertenlu;
- 19. Pembeldjufiiii adalah proses inleraksi pesecta didik dengan pendidik dan sumber belujar padd sualti lingkungun belujur;
- 20. Evaluasi Pendidikun adalah kegiatan pengendaiian, penjiiliinan dan penetapan mutu pendidikan terhudup berbagui Komponen ke pendidikun pada setiap jalur. jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentu pertanggungiawaban penyelenggaraan pendidikan;
- 21. Akreditasi adalah kegialan penilaiaii kelayakan pendidikan progradalam satuan pendidikan berdusarkan kriteria yang Ielah diietapkun;
- 22. Samber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaruun pendidikun yang melipuli tenagu Kependidikun, musyurukat, dana. saruna dun prasarana;
- 23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang berauggoliikun berbagai unsur masyarakat Yang peduli pendidikan;
- 24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang Lua / wali peserta didik, komunilås sekolah serta tokoh masyurakal peduli pendidikan;
- 25 Siswa adaluh peserla didik pada saiuan pendidikan dasur 'di jultw Pendidikan Sekoluh;
- 26. Orang tua adalah Ayah alau Ibu wali siswa;
- 27. Menteri adaläh Menleri yang berlanggung jawab dalam bidung Pendidikan Nasionul.

BAB II TtJJlJAN

(1) Pembeniukan Unil Pelaksana Tek-nis Dacruh mengenai kelembagaan SekoJah Dasar bertujuan meningkutkan pengeluhuan dun kemajnpuan Siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengudakan hubungun timbal balik dengail lingkungun sosial budaya. sertu dapat melynjulkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

(2) UnL1ik mencapai tlJjuan sebagaimana dimaksud dalum uyut (l) Pasal ini penyelenggaraan Pendidikan Dasar berpedoman pada tujuun Pendidikan Nasional.

BAB 111

- (1) Pengelolaan Pembentukan Unil Pelaksana Tekllis Daerah iiiengenai Kelembagaan Sckolah sebagai bagiun 'duri sistem Pendidilt'üll Nasional adalah langgung jawab Pemerintah Daerah naelallii Kepala I)inas.
- (2) Pimpinan Sekolali Dasar adulali Kepalu Sckolali .
- (3) Pimpinan Sekolah dibantu oleh Tenaga Kependidikan Iainnya tenaga udmiilistrusi yang berada dibawuh koordinasi Sub Bugiiili Talu Usaha.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolall basar dilelapl:an Oleh Bupaii.

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulnm, buku pelajaran, peralalan pendidikan, [anali dan gedung seria pemeliharaannya pada Sekolali Dasar menjadi tunggung jawub Pemerintull Daerah.

Pasal 5

Kepala Sekolah bertanggung ,jawab kepada Kepala Dinas alas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolall, pellibinaan Ienaga Kependidikan Iainnya dan pendayagunaan sarana dan prasatuna.

Pasal 6

Sub Bagian Tata l_Jsaba di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata U saha

BAB IV KIJRIKUI,UM Pusal 7

- (I) Isi kurikulum Pendidikan Dasar illerupakan susnnan ballan kujian dan pelajaran untuk mencapai tiljuan Pendidikan basar dalum rangka upaya mencapai tiljuajl pendidikan.
- (2) Isi kurikulum Pendidikan Dasar wajib memuat bahan kujian dan matu pelajaran tentang :
 - u. Pendidikalû Puncasila;
 - b. Pendidikan Agama;
 - c. Pendidikan Kewarganegaraan.

sesuai dengun keadaan lingkungan dan ciri khas sckolali yan . bersungkutun dengan tidak mengurungi kurikulum yang beilaku secac, nasional.

(5) Sckolall Dasar dapat rneqitibaikan dan menambali ballan Lujiuii darimalu pelajaran sesuai dengan kebutuhan setemput.

BAB V SISWA Pasal 8

- (1) Untllk dupat dilerilna sebugai siswa Sekoluh Dasar seseorang harus memiliki kemampuan yang disyaratkun Oleli Sekolali basar yane bersangkutan.
 - (2) Pclaksanuan ketenLuan sebagaimana dimaksud dalalil ayal (I) posal in diatur oleh Kepula Dinas.

Pasal 9

- (1) Siswa znempunyai hak:
 - a. mendapul perlakuan sesuai dengan bakat, hikmah dan kemampuannya;
 - b. memperoleli pendidikan agama sesuai dengun aganja yang dianlllnya•,
 - c. mengilalti program pendidikaii yang bersangkutan atus dasur Pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleli pengakuan lingkiii pendidikan terlentu yang telull dibukllkun;
 - d. mendapal buntuan fusililas belajar. beasiswa uluu blinlàan Iaiii sesuai dengan persyaratan yang berlakn;
 - e. pinduh ke Sckolah Dasar yang sejajar atau yang tingkainya lebill tinggi sesuai dengan persyaralan penerimaan siswa pada Sekolull Dasar yang Ilenduk dimusuki.
- (2) Siswa mempunyai kewujiban :
 - a. iklil menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. kccuali bilamana siswa dibebaskun duri kewajiban tersebut sesuai ciengan pemturan yung berluku;
 - b. mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. menghormati tenuga kependidikan;
 - d. ikut memelihara sarana dun prasarana sella kebersilian, ketcnlibuii dan kcamanun Sekolah basar yang bersangkutan-
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dun (2] Pasal ini diatur oleh Kepala Dinas.

Penilaian Sekolali Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinajubungan dan bersifat lerbâka untuk rnemperolell ketenangan tenlang kegiałan dan kemujuan belajar siswa, pelaksanaall ţurjkulułn, guru dun lenaga Ih;ndidik

Pasal I 1

- Psnilaiali pelaksanaan kuriktlllih dilakukan guna mengeluljui kesesuaian anhara ktuikuluh Sekolah Dasar yang becsangkutari dengan dasar, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasiouul sesuai dengan kemampuan siswa sena perkembangan masyarakat.
- mengelahui kelnampuaîi dan kewenangan professional.

 (3) Ilasil penilaian sebagaimana yang dimuksud ayat (2) Pasal ini diguuakan untuk:

Penilaian IGIhadap guru dan lenaga kependidikan dilakukali uniuk

lainnyu;
b. penyempurnaan kurikululn dan pengelolaan program pendidikan guru dan lenaga kependidikau lainnya.

4) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (I) ayal (2) dun ayat

pembinaau dan pengembangan guru dan tenaga kependidikall

(3) Pasal ini dilakmkan olelî Kepala Dinas.

BARVII

lainnva.

(2)

a.

PEMBIAYAAN Pagalaa

Pasal12

- Dengan telali dilakukun Pembukaan Kelembagaan Sekolali Dasén•
 Negeri sebagaimana dimaksud dalarn Lampiran Pertiluran Bupuli ini,
- terhadap segula biaya penyelenggaraan, saranu dan prusarana Sekoldh menjadi beban Pemerintah Daerah dengan pelnbinaun dun pengawasan pada Dinas melalni Anggaran Pendapalan dan Belaaju Daerali

Kabupaten Melawi dan pendapalan Iuin, baik dari Pemeriniah Plłsat maupun sumber lain yang sah dan lidak mengikat.

(2) Pembiayuan sebagaimana dimaksud ayal (I) Pasal ini melipuli :a.guji gtnu, tenaga kependidikun laiunyu dan tenaga adminisirasi;b. biaya pengadaan dan perneliharaan sarana dan prasarana;

c.biaya perluasan dan pengembangan.

BAB VIII

ternaaap beK01an aalam rangxa pemumaan, pengawasai perlindungan, peningkatan dan pelayanan Sokoluli bersangkutun.

- (2) Pengawasan dilaklikan terflûdap penyelenggaraan pendidil.an da• administrusi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (I) dan ayat (2) lⁱasal il diatur oleh Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasul 14

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang Ielali sebelum Peraturun Bupati ini, sepanjang tidak berlen(angan dengi Peraturali Bupati ini masih tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pusal IS Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yal tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan ini millui berlaku puda tanggul diundangkan. Agar setiap orai dapat mengetahuinya, memerintahkan pengtlndangan Peratnran ini deng% menempalkannya Berna Dacruh Kabupalen Melawi.

Ditctapkan di Manga Pinoli padu tunggu110t-UguW2() 10

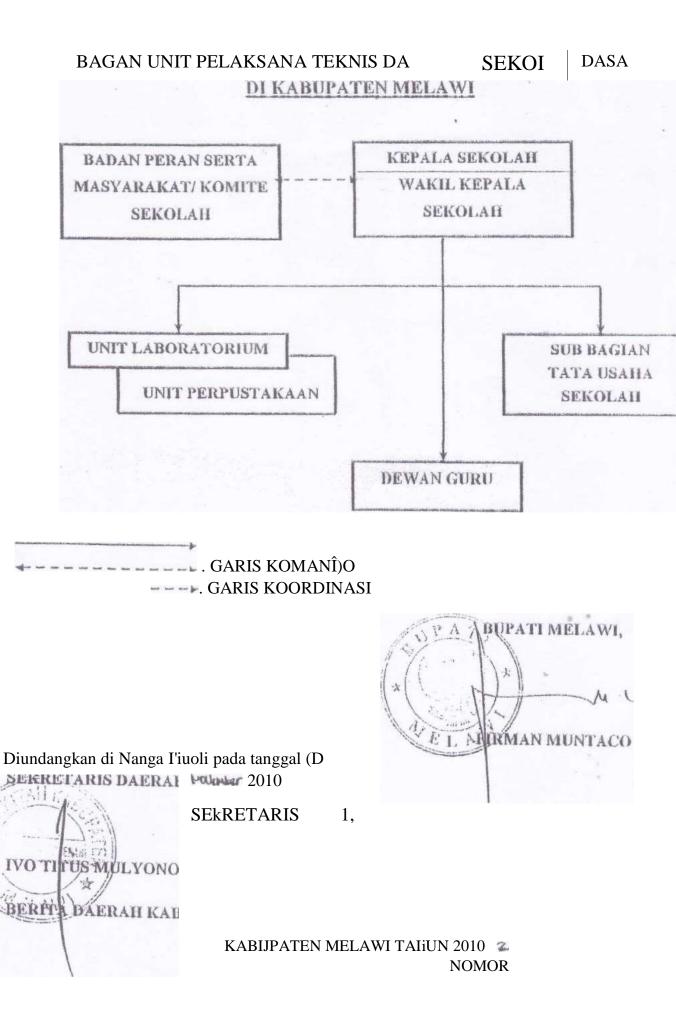


Diuudangl'an di Nanga Pinoh pada tauggal 2010

FIRMAN MUNTACO

KABUPATEN MELAWÏ TÀIIUN 2010 NOMOR

7



LAMPIRAN 11: PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 37 TAHUN 2010

TANGGAL 10 2010

TENTANG: PEMBENTUKAN UNIT PFLAKSANA TEHNIS

DAERAH

MENGENAI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR

DI KABUPATEN MELAWI

NAMA - NAMA UNIT PELAKSANA TEHNIS DAERAH SEKOLAH DASAR

KECAMATAN

ALAMAT

DUSUN MULUNG

LANDAU BUNGA

PENYENGKUANG

EMANG RAYA

LABAI MEKAR

NO

NAMA SEKOLAH

SDN 23 MULUNG

SDN 20 LANDAU BUNGA

SDN 15 EMANG RAYA

SDN 16 LABAI MEKAR

SDN 21 KERANGAN PANJANG

27. 28.

29.

30.

31.

110	TWINIT DEIXOLITI	ILLC/ IIVI/ I I I I I	
1	2	3	4
1.	SDN 25 TAHLUT	NANGA PINOH	KELAKIK
2.	SDN 26 SIDOMULYO	NANGA PINOH	SIDOMUL YO
3.	SDN 27 KENIJAL	NANGA PINOH	KENUAL
4.	SDN 28 KELAKIK	NANGA PINOH	JLN .PROPINSI N.PINOH KOTA BARU KM 4
5.	SDN 20 TEKABAN	BELIMBING	TEKABAN
6.	SDN 21 ENTEBAH	BELIMBING	ENTEBAH
7.	SDN 22 PEKOLAI	BELIMBING	UPIT
8.	SIDN 23 PALUS HULU	BELIMBING	LANGAU
9.	SDN 24 PINTAS BELIMBING	BELIMBING	BALAI AGAS
10.	SDN 25 SUNGAI DURI	BELIMBING	SUNGAI DURI
	SDN 26 BANCOH	BELIMBING	BANCOH
12.	SDN 24 SUNGAI LABU	ELLA HILIR	SUNGAI LABU
13.	SDN 25 SUNGAI LALANG 1	ELLA HILIR	SUNGAI LALANG 1
14.	SDN 26 AMPOLAH	ELLA HILIR	AMPOLH
15.	SDN 27 KOMONDAL	ELLA HILIR	KOMONDAL
16.	SDN 28 BELABAN NYURUH	ELLA HILIR	BELABAN NYURUH
17.	SDN 19 KECUKUH	PINOH UTARA	KECUKUH
18.	SDN 20 AKAMAYAU	PINOH UTARA	AKAMAYAU
19.	SDN 21 MERAH ARAI	PINOH UTARA	MERAH ARAI
20.	SDN 22 JABA	PINOH UTARA	JABA
21.	SDN 23 SENIBUNG LAUT	PINOH UTARA	SENIBUNG LAUT
22.	SDN 24 LUMUT	PINOH UTARA	LUMUT
23.	SDN 25 KAYAN SEMAPAU	PINOH UTARA	KAYAN SEMAPAU
24.	SDN14 SENUANG	TANAH PINOH BARAT	SENUANG
25.	SDN 15 NANGA KIDANG	TANAH PINOH BARAT	NANGA KIDANG
26.	BIRAPATI	TANAH PINOH BARAT	MAHIKAM

NANGA PINOH

PINOH SELATAN

PINOH SELATAN

SOKAN

SOKAN

NOVEMBER

32.	SDN 17 RAHAN RIRIT	PINOH SELATAN	RAHAN RRIT

DI KABUPATEN MELAWI

34.SDN